

**PENGARUH RASIO KEUANGAN DAERAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL**
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2013-2017)

**Oleh :
Zetty Iqmi
Pembimbing : Nasrizal dan Hariadi**

*Faculty of Economics and Business Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : zettyiqmi7@gmail.com*

*Effect Of Local Government Financial Ratio, General Allocation Funds And Regency
Own Revenue To Capital Expenditure At Kabupaten/Kota
On Riau Province At Years 2013-2017*

ABSTRACT

This research was examined the influence of Local Government Financial Ratio, General Allocation Funds And Regency Own Revenue to Capital Expenditure At Kabupaten/Kota On Riau Province At Years 2013-2017. The population in this study are all Kabupaten/Kota at Riau Province. This research is included in quantitative research. The type of data used in this study is secondary data from Laporan Rencana Anggaran (LRA) of the aforementioned Kabupaten/Kota on Riau Province and data derived from the Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah website www.djpk.depkeu.go.id, sampling is done by the method of purposive sampling is the technique of sampling with certain considerations. The total sample in this study are 11 Kabupaten/Kota. These data were analyzed using multiple regression analysis with SPSS Version 17. The results of this study showed that Local Government Financial Ratio affects Capital Expenditure with significant value 0,006, so the conclusion Hypothesis 1 accepted, General Allocation Funds affects Capital Expenditure with significant value 0,015, so the conclusion Hypothesis 2 accepted and Regency Own Revenue affects Capital Expenditure with significant value 0,000, so the conclusion Hypothesis 3 accepted.

Keywords : Capital Expenditure, Local Government Financial Ratio, General Allocation Funds, Regency Own Revenue

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut dapat kita buktikan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional Indonesia pada setiap tahunnya yaitu di mulai dari tahun 2013 mencapai angka 5,01 persen, tahun 2014 mencapai angka 5,02 persen, tahun 2015 mencapai angka 5,04 persen, tahun 2016 mencapai angka 5,06 persen, dan pada tahun 2017 mencapai angka 5,07 persen (Badan Pusat Statistik, 2017).

Besarnya angka pertumbuhan dan pendapatan nasional tidak terlepas dari besarnya pengaruh pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan sumber daya alam dan potensi untuk setiap provinsi di Indonesia.

Besarnya pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam tersebut akan menambah sumber keuangan daerah masing-masing. Meningkatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di beberapa provinsi tidak menjamin kelangsungan pembangunan dan tidak juga

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Hal ini dapat dilihat dengan masih adanya ketidakterediaan infrastruktur sarana dan prasarana yang mendukung untuk pelayanan kepada masyarakat (Haryuli, 2014).

Belanja Daerah adalah pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Nordian, 2009).

Sumbangsih pendapatan daerah dari sumber daya alam maupun sumber daya lainnya oleh kabupaten/kota setiap provinsi merupakan salah satu sumber keuangan yang menambah pundi-pundi pendapatan nasional. Tingginya pendapatan suatu daerah untuk negaranya dapat mendukung pembangunan nasional dalam berbagai aspek pembangunan nasional adalah meningkatkan mutu infrastruktur fasilitas umum bagi masyarakat.

Peningkatan mutu infrastruktur dan pembenahan sarana dan prasarana merupakan hal yang vital dalam pembangunan nasional. Untuk meningkatkan pembangunan nasional, perhatian terhadap pembangunan daerah juga menjadi masalah penting yang harus segera dikoreksi dan dilaksanakan secara adil dan merata oleh pemerintah pusat. Belanja infrastruktur dan belanja modal seharusnya lebih tinggi untuk mendukung pembangunan daerah dan nasional, karena belanja modal merupakan salah satu faktor untuk mendukung kesejahteraan. Namun yang terjadi saat ini belanja modal memiliki porsi yang rendah di bandingkan dengan belanja operasi hal ini di sebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah dalam mengalokasikan alokasi belanja modal untuk sektor publik.

Rasio efisiensi keuangan daerah adalah salah satu cara membandingkan total pengeluaran daerah dengan total pendapatan daerah. Jika rasio efisiensi rendah berarti pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran belanja modal semakin baik. Pemerintah daerah perlu memperhitungkan secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima, sehingga dapat diketahui apakah pendapatannya efisien atau tidak. Hal ini perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari realisasi pendapatan yang diterima (Abdul Halim, 2007:234).

Dana alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan antar daerah, dana alokasi dimaksudkan untuk membantu kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu sesuai dengan urusan dan prioritas daerah itu sendiri, dengan tujuan untuk pemerataan dan keadilan secara selaras demi menggilir kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai penyelenggaraan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal pembangunan berkelanjutan (Soeratno, 2010).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu dihubungkan dengan kewenangan daerah untuk memungut pajak (daerah) atau pungutan lainnya seperti retribusi, sementara pendapatan asli daerah juga dapat berasal dari sumber lain seperti hasil pengelolaan perusahaan daerah meskipun hasilnya yang relatif kecil.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah rasio efisiensi keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal? 2) Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh terhadap

alokasi belanja modal? 3) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal?

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui pengaruh rasio efisiensi keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal. 2) Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi belanja modal. 3) Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap alokasi belanja modal.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Alokasi Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Kelompok belanja ini mencakup jenis belanja baik untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik (Mardiasmo, 2009).

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah adalah salah satu cara membandingkan total pengeluaran daerah dengan total pendapatan daerah. Jika rasio efisiensi rendah berarti pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran belanja modal semakin baik. Pemerintah daerah perlu memperhitungkan secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima, sehingga dapat diketahui apakah pendapatannya efisien atau tidak. Hal ini perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih

besar dari realisasi pendapatan yang diterima (Abdul Halim, 2007:234).

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Yani (2009) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Teori

Pengaruh Rasio Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Rasio efisiensi keuangan daerah adalah salah satu cara membandingkan total pengeluaran daerah dengan total pendapatan daerah. Jika rasio efisiensi rendah berarti pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran belanja modal semakin baik. Pemerintah daerah perlu memperhitungkan secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima, sehingga dapat diketahui apakah pendapatannya efisien atau tidak. Hal ini perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari realisasi pendapatan yang diterima (Abdul Halim, 2007:234).

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Putro, 2011). Dengan adanya transfer Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan Pendapatan Asli Daerah yang dimilikinya untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik dan mensejahterakan kehidupan masyarakat didaerahnya. Dana Alokasi Umum sendiri memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan meningkatkan sarana dan prasarana umum untuk membidik masyarakat yang sadar akan modernisasi zaman. Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Menurut Nurcholis (2008), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah biasanya diperoleh dalam jumlah yang tidak terlalu besar untuk setiap kali transaksi, tetapi frekuensi transaksi tersebut sangat tinggi. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan

penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Semakin besar dana Pendapatan Asli Daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya masing-masing.

Hipotesis Penelitian

- H₁ : Terdapat pengaruh Rasio Efisiensi Keuangan Daerah terhadap alokasi Belanja Modal.
- H₂ : Terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi Belanja Modal.
- H₃ : Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap alokasi Belanja Modal.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Pemilihan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah di Provinsi Riau. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kota / kabupaten di Provinsi Riau dari tahun 2013 - 2017. Dari 12 Kabupaten dan Kota yang dijadikan populasi, maka terpilih 11 Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai sampel penelitian.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Alokasi Belanja Modal (Y)

Indikator variabel belanja modal diukur dengan (Mardiasmo, 2009):

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X₁)

Rumusan untuk rasio efisiensi keuangan daerah diukur dengan (Abdul Halim, 2007):

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}}$$

Dana Alokasi Umum (DAU) (X₄)

Dana Alokasi Umum untuk daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota dapat diukur dengan rumus (Undang-undang Nomor 33 tahun 2004) :

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dimana,
 $\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$

Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X₃)

Menurut Mardiasmo (2002) cara mengukurnya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi PAD} \times 100\%}{\text{Anggaran PAD}}$$

Teknik Analisis Data

Sebelum melakukan regresi terdapat syarat yang harus dilalui yaitu melakukan uji asumsi klasik. Model regresi harus bebas dari asumsi klasik, yaitu bebas dari normalitas, multikolonieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah kemudian dianalisis dengan alat statistik . Persamaan yang diperoleh dalam analisis data tersebut adalah sebagai berikut dengan model regresi yang digunakan:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Belanja Modal (BM)

A = Konstanta

β = Slope atau Koefisien Regresi

X₁ = Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

X₂ = Dana Alokasi Umum (DAU)

X₃ = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

e = error

Uji Kelayakan Model (Goodness of fit)

Goodness of Fit Test digunakan untuk menguji pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Penggunaan *adjusted* R² jauh lebih disarankan daripada R² sebab nilai *adjusted* R² dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2009).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Berikut adalah statistik deskriptif dari sampel penelitian tahun 2013-2017 :

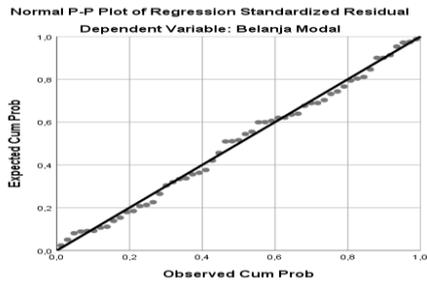
Tabel 1
Statistik Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|----|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Belanja Modal | 55 | 92.805.228.520 | 2.154.123.709.007 | 537.633.145.918,29 | 403.496.174.701,772 |
| EKD | 55 | ,0006 | 3,5311 | ,623600 | ,6095070 |
| DAU | 55 | 31.862.241.000 | 959.493.675.276 | 562.229.820.277,75 | 198.810.070.870,179 |
| PAD | 55 | 5.547.875.473 | 1.010.623.791.415 | 185.324.739.488,78 | 177.013.315.695,419 |
| Valid N (listwise) | 55 | | | | |

Sumber : Data Olahan, 2018

Hasil Uji Normalitas Data

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot



Sumber : Data Olahan, 2018

Dari gambar plot dapat dilihat bahwa titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas

| Coefficients ^a | | | |
|---------------------------|------------|-------------------------|-------|
| Model | | Collinearity Statistics | |
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | | |
| | EKD | ,985 | 1,016 |
| | DAU | ,939 | 1,065 |
| | PAD | ,938 | 1,066 |

a. Dependent Variable: MODAL

Sumber : Data Olahan, 2018

Dari tabel di atas terlihat bahwa tiap variable memiliki nilai *tolerance*-nya diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10. Dari hasil pengujian tersebut dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel-variabel independen yang diteliti.

Hasil Uji Autokorelasi

Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson.

Tabel 3
Hasil Uji Autokorelasi

| Model Summary ^b | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | ,736 ^a | ,524 | ,469 | ,2125303 | 1,460 |

a. Predictors: (Constant), PAD, EFESIENSI, DAU

b. Dependent Variable: MODAL

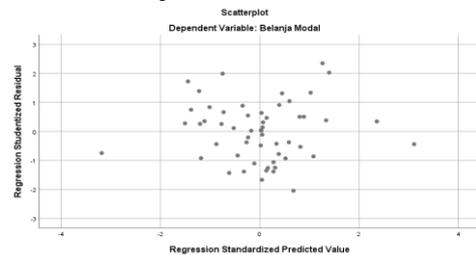
Sumber : Data Olahan, 2018

Dari tabel diatas dihasilkan nilai DW untuk ketiga variabel independen adalah 1,460 yang berarti nilai DW berada sekitar 2, maka dapat dikatakan tidak ada korelasi, kalau besarnya mendekati 0, maka terdapat autokorelasi positif dan jika besarnya mendekati 4, maka terdapat autokorelasi negatif, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi dalam data pengamatan penelitian ini.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik *scatterplot* dibawah ini:

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedestisitas



Sumber : Data Olahan, 2018

Dari grafik *scatterplot* di atas terlihat bahwa titik- titik menyebar secara acak, serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heterokedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model yang dirancang dalam penelitian ini melibatkan 3 variabel

independen, yaitu Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|-----------------------------|------------|-------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | | |
| 1 | (Constant) | 11,367 | 1,761 | | 6,454 | ,000 |
| | EKD | ,087 | ,030 | ,310 | 2,847 | ,006 |
| | DAU | ,291 | ,115 | ,282 | 2,528 | ,015 |
| | PAD | ,324 | ,079 | ,461 | 4,126 | ,000 |

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data Olahan, 2018

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

$$\text{MODAL} = 11.367 + 0.087\text{EFISIENSI} + 0.291\text{DAU} + 0.324\text{PAD} + e$$

Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Adapun hasil uji koefisien determinasi (R^2) adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Koefisien Determinasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,736 ^a | ,524 | ,469 | ,2125303 |

Sumber : Data Olahan, 2018

Dari tabel di atas diperoleh R Square (R^2) sebesar 0,524. Dengan demikian variabel Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah dapat menjelaskan variabel Belanja Modal sebesar 52,4%. Sedangkan sisanya sebesar 47,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini, seperti rasio aktivitas lainnya. Semakin besar nilai R Square, maka akan semakin kuat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya.

Pembahasan

Untuk melakukan pengujian terhadap masing-masing hipotesis, maka akan digunakan uji regresi parsial (uji t) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individu atau parsial, apakah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Nilai t_{tabel} dalam penelitian ini di tunjukkan dengan $df = n-k-1 = 55-3-1 = 51$ dengan taraf signifikan 0,05 maka t_{tabel} yang di dapat adalah 2,004. Berikut ini adalah hasil pengujian masing-masing hipotesis serta pembahasannya.

Pengaruh Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal

Tabel 6
Uji Hipotesis I

| Variabel Independen | t_{hitung} | t_{tabel} | Signifikan | Keterangan |
|---------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| EKD | 2.847 | 2.004 | 0.006 | H_1 diterima |

Sumber : Data Olahan, 2018

Dari hasil uji t pada tabel diatas, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,847 dan t_{tabel} sebesar 2,004 dengan nilai signifikansi 0,006. Dimana didapatkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0.05 karena lebih kecil dari 0.05, maka hipotesis 1 diterima dan kesimpulannya adalah Rasio Efisiensi berpengaruh terhadap Belanja Modal **H1 diterima**.

Hal ini didukung oleh penelitian Vegasari (2011) yang menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah nilai efisiensi maka belanja modal akan semakin rendah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara *output* dan *input* atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula

sebaliknya. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan (Ardhini, 2011). Dalam konteks efisiensi dan efektivitas anggaran, maka pemanfaatan anggaran secara sederhana dapat dikatakan bertujuan untuk memberikan efek kepada peningkatan kualitas layanan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal yang menjadi kepentingan masyarakat pada umumnya.

Rasio efisiensi keuangan daerah adalah salah satu cara membandingkan total pengeluaran daerah dengan total pendapatan daerah. Jika rasio efisiensi rendah berarti pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran belanja modal semakin baik. Pemerintah daerah perlu memperhitungkan secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima, sehingga dapat diketahui apakah pendapatannya efisien atau tidak. Hal ini perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari realisasi pendapatan yang diterima (Abdul Halim, 2007:234).

Efisiensi yang rendah menyebabkan banyaknya layanan publik dijalankan apa adanya secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik, sementara dana pada anggaran daerah yang pada dasarnya merupakan dana publik sebagian dibelanjakan untuk belanja pegawai. Dalam jangka panjang ini akan memperlemah pemerintah daerah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator dan wirausaha dalam proses pembangunan daerah yang berkelanjutan. Selain tidak efisien, jumlah alokasi belanja modal untuk

program kerja pembangunan belum dijalankan sesuai dengan basis tuntutan anggaran dan kebutuhan aslinya.

Namun hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardhini (2011) yang menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan negative terhadap alokasi belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Tabel 7
Uji Hipotesis II

| Variabel Independen | t_{hitung} | t_{tabel} | Signifikan | Keterangan |
|---------------------|--------------|-------------|------------|-------------------------|
| DAU | 2.528 | 2.004 | 0.015 | H ₂ diterima |

Sumber : Data Olahan, 2018

Dari hasil uji t pada tabel diatas, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2.528 dan t_{tabel} sebesar 2.004 dengan nilai signifikansi 0.015. Dimana didapatkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 karena lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 2 diterima dan kesimpulannya adalah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal **H2 diterima**.

Hasil ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2010) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk belanja modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Perbedaannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari uang masyarakat sedangkan Dana Alokasi Umum berasal dari transfer Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi (Yovita, 2011).

Dengan adanya transfer Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan Pendapatan Asli Daerah yang dimilikinya untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik dan mensejahterakan kehidupan masyarakat didaerahnya. Dana Alokasi Umum sendiri memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan meningkatkan sarana dan prasarana umum untuk membidik masyarakat yang sadar akan modernisasi zaman. Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dari pengertian yang di ambil dari Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum lebih diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah.

Menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 porsi Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Sementara itu, proporsi pembagian Dana Alokasi Umum untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat "Block

Grant" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah.

Dana Alokasi Umum ini sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Dana Alokasi Umum yang diterima maka berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri, dan begitu juga sebaliknya. Kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, jika ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi semakin tinggi (Sulistyowati, 2011).

Namun hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafitri (2009) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Tabel 8
Uji Hipotesis III

| Variabel Independen | t_{hitung} | t_{tabel} | Signifikan | Keterangan |
|---------------------|--------------|-------------|------------|-------------------------|
| PAD | 4.126 | 2.004 | 0.000 | H ₃ diterima |

Sumber : Data Olahan, 2018

Dari hasil uji t pada tabel diatas, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4.126 dan t_{tabel} sebesar 2.004 dengan nilai signifikansi 0.000. Dimana didapatkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 karena lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 3 diterima dan kesimpulannya adalah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal **H3 diterima**.

Hasil ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal

(2017) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan positif dengan alokasi belanja modal.

Menurut Nurcholis (2008), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah biasanya diperoleh dalam jumlah yang tidak terlalu besar untuk setiap kali transaksi, tetapi frekuensi transaksi tersebut sangat tinggi. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Semakin besar dana Pendapatan Asli Daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya masing-masing.

Namun tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2013) tidak menemukan adanya hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan alokasi belanja modal.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Dana

Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Keterbatasan Penelitian

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian, hasil penelitian ini juga mengandung beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Pemilihan objek penelitian hanya menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota untuk satu provinsi saja.
2. Penelitian ini hanya menguji pengaruh variabel Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah. Variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh juga terhadap Belanja Modal tidak diuji dalam penelitian ini.
3. Periode penelitian yang digunakan hanya terbatas lima tahun. Periode waktu yang terbatas tersebut tentunya mempengaruhi hasil penelitian ini.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu:

1. Penelitian selanjutnya mungkin dapat mempertimbangkan untuk menggunakan objek penelitian beberapa provinsi, sehingga dapat dilihat generalisasi teori secara valid.
2. Penelitian selanjutnya hendaknya mempertimbangkan beberapa variabel lain yang mungkin mempengaruhi Belanja Modal untuk meningkatkan pengetahuan mengenai Belanja Modal di Indonesia.
3. Periode penelitian selanjutnya sebaiknya lebih dari lima tahun

karena periode yang lebih panjang diharapkan dapat memungkinkan klasifikasi berdasarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwiyana, Priya. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang
- Ardhani, Pungki. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang
- Ardhini, 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektik Teori Keagenan. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi sektor publik suatu pengantar*. Erlangga. Jakarta
- Data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota Provinsi Riau, 2012. Diakses melalui www.djpk.depkeu.go.id
- Dwirandra, A.A.N.B. 2009. Efektivitas dan kemandirian keuangan. Universitas Udayana. Bali
- Fathony, Adi Dicka. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Dana Alokasi Umum Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran. Universitas Diponegoro. Semarang
- Frelistiyani, Winda, 2011. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Halim, Abdul, dkk. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta Selatan
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2009. Hubungan dan Masalah keagenan di Pemerintah Daerah.
- Khairani, Siti. 2008. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Terhadap Belanja Aparatur, dan Belanja Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi Vol.7 No.1, 2008: 54-75*.
- Losa, Alfino. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat. Universitas Riau. Pekanbaru
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta

- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta
- Prakosa, Kesit Bambang. 2008. Analisis pengaruh dana alokasi umum (dau) dan pendapatan asli daerah (pad) terhadap prediksi belanja daerah. *JAAI Volume 8 NO. 2, Desember 2004*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
- Putro, Nugroho Suratno. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang
- Setiawan Anjar, 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang
- Situngkir, Anggiat. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Soeratno. 2009. Analisis Faktor-Faktor Pendapatan Dominan dan Implikasinya Terhadap Anggaran Belanja Daerah. Universitas Esa Unggul Jakarta. Jakarta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.
- Sularso, Havid, dkk. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi. Universitas Jenderal Soedirman. *JurnalMedia Riset Akuntansi, vol.1No. 2 Agustus 2011*. Purwokerto
- Sulistyowati, Diah. 2011. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang
- Syafitri, Irma. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Udin, Rinaldi. 2012. Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. STIE Indonesia. *Jurnal ISSN 1693 – 9093 Volume 8, Nomor 2, Juni 2012 hal 105 – 113*. Pontianak
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 2012.
- Wijaya, Agung. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta Dilihat dari Rasio Pendapatan Daerah. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta
- Suryati, Evi. 2012. Pembagian APBD Riau Belum Adil. Diakses Melalui: www.riapos.co/index.php/citizen/news/foto/?act=category&id=6.
- Yovita, Farah Marta, 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang